

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, 2018.

Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy J A Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Christina Bagenda, et al., *Tindak Pidana Dalam Kuhp*, Edited by Evi Damayanti, Cv Widina Media Utama. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, 2015.

Santoso, T, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, 2020.

Hartanti, E, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005.

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2016.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021.

Lamintang, P A F, and F T Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2022.

Mertha, Ketut I, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, and I Made Sugi Hartono, *Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, 2016.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nurhayati, Yati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Edited by Ifrani Ifrani. Bandung: Nusa Media, 2020.

Sri Wahyuni, S.E.M.E.D., and S.E.M.E.D.M. Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset*, Nas Media Pustaka, 2020.

Media, P., *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Prenada Media, 2018.

Mahmud, Ade., *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Fitri Wahyuni, FITRI. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Ilyas, A, and M Mustamin. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan : Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Dr. Ruslan Renggong, S.H.M.H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta, 1987.

B. JURNAL

Ar, El Firsta Nopsiamti, and Dessy Rakhmawati. 2023. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama ". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2):184-90. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27002>.

Yolanda, Elvara, Usman Usman, and Elly Sudarti. 2022. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3 (2):125-45. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>.

Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi, 2021, "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (1):1-22. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>.

Agustin, Lidya, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita. 2024. "Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5 (3):364-78. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37250>.

Nurholidah, Nurholidah, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita. 2021. "Problematisasi Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2 (3):12-24. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>.

Ifrani, Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl* 9, no. 3 (2017): 319–36, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

Aslia, Mezhi Nur, and Ai Marliah, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Wacana Paramarta* 14, no. 2 (2015).

Deli, Rizi Riski. "Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang." *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016).

Bureni, Imelda F K. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 292–98.

Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i2.15>.

Kamal, Achmad. "Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Sintaksis* 1, no. 3 (2021): 42–53.

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021).

Mokobimbing, D. S. (2015). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Lex Crimen*, 4(3).

R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Deypend T. S. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-7. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11101>.

Pranoto, Agus, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 91–121.

Jaya, Arizon Mega. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)." *Cepalo* 1, no. 1 (2017): 21–30.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor SE 004/JA/8/1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan
Pembayaran Uang Pengganti.